

SWARA

PERTALINDO

Edisi Vol.4 No.1 | Juli - September 2025

PERKUMPULAN TENAGA AHLI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

ISSN 2987-5536



9 772987 553008

MENYONGSONG

MUNAS 2025

ERA BARU KEPEMIMPINAN PERTALINDO

IKN DAN MASA DEPAN KALIMANTAN

Dr.Ir.VERA AMELIA, M.Si :
GEGAR EKOSISTEM DI IKN?

DPP KALTIM DAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SAMARINDA

Dapur Redaksi



Foto: Kesibukan di dapur Redaksi Sebelum Berita Naik Cetak

Untuk terbitan kali ini “dapur redaksi” ditempatkan di depan, maksudnya biar pembaca tahu bagaimana proses memasak di Media Swara Pertalindo.



Ketua Umum Pertalindo
Kecapekan diskusi panjang
Swara Pertalindo



Pak Zul dengan gaya kiyai
sepuh dan masih produktif.



Armen Mara, Pemred
penuh dedikasi



Pak Chris dengan sarung
di leher tetap memikirkan
Swara Pertalindo



Pak Betara Saringan berita
sebelum cetak



Pak BP Coment dan sarann-
ya yang bernalas



Pak Al Mudzni Energik
sebagai kamus Lingkungan
berjalan



Mas Yoda , paling muda dan
layout andalan

REDAKSI

Penanggungjawab

Ir. Ilan R. Suriadi

Wakil Penanggung Jawab

Ir. Zulkifli Ali, M.Si

Betara Hendra,S.Sos, M.Si

Pemimpin Redaksi

Dr.Ir. Armen Mara, M.Si

Dewan Redaksi

Ir. Zulkifli Ali, M.Si

Betara Hendra,S.Sos, M.Si

Dr.Ir.La Ode NgKoimani, M.Si

Al Mudzni, S.Pi, M.Si

Design dan Layout

R.M.A Noorsyoda, S.Kel

Website

Dini Nadiatu Rohmah, S.Si

Korespondensi

Ir. Dahyar (DKI), Zul Andri (Sumbar),
Christian Pasaribu (Jawa Barat),
M.Farandika Akbar SP (Jambi), Ir.
Kifayatul Akhyar (Samarinda)

Dari Redaksi

Swara PertaLindo terbitan Volume 4 Nomor 1 tahun 2025 ini memiliki arti penting karena memuat berita-berita menarik, antara lain berita Menyongsong MUNAS 2025, Munasus 2025, Rakernas 2025, Workshop SOSEKBUD, Pelatihan PKPA dan lainnya. Semuanya merupakan Program Kerja Pengurus DPN PertaLindo yang dinantikan oleh warga PertaLindo di seluruh Indonesia.

Disamping itu, Swara PertaLindo terbitan Volume 4 Nomor 1 tahun 2025 ini juga terasa istimewa karena Pimred bisa memotret langsung Kota Samarinda di Kalimantan Timur dan IKN (Ibu Kota Nusantara). DPP PertaLindo di Provinsi Kaltim termasuk salah satu DPP dengan jumlah anggota terbanyak.

Selama kunjungan ke Kota Samarinda tersebut saya didampingi oleh Ketua DPP PertaLindo Kaltim, Ir.Heryanto M.Si. Kami bertemu muka dengan Kadis Lingkungan hidup Kota Samarinda, Kabid Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Pengurus DPP PertaLindo Kaltim (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang senior PertaLindo Kaltim). Paling menarik saya bisa menyaksikan aktivitas sehari-hari dari Pak Misman, penerima Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan tahun 2023. Bertemu juga dengan Pak Akhyari pemerhati lingkungan hidup yang juga mitranya pak Misman sendiri.

Terimakasih Pak Ilan R.Suriadi, Ketua Umum PertaLindo, tanpa kebijakan beliau tak mungkin kunjungan tersebut akan terlaksana. Terimakasih juga kepada teman-teman Tim Redaksi yang mempercayakan tugas ini kepada saya. Kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kota Samarinda terimakasih atas sambutan yang baiknya.

Demikian dari redaksi semoga terbitan ini dapat dibaca dan bermanfaat bagi semua pihak yang peduli lingkungan hidup dan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Aamiin yaa robbal aalamiin.

Alamat Redaksi

Sentra Timur Commercial Park, STCP-7 No.12
Jl. Sentra Primer Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur - DKI Jakarta

Pimpinan Redaksi

Dr.Ir.Armen Mara, M.Si

DAFTAR

4

BERITA



77

TOPIK



6

Menyongsong
MUNAS 2025 : Era
Baru Kepemimpinan
Pertalindo

8

Munassus Pertalindo:
Perubahan AD ART
Pertalindo

10

Rakernas Pertalindo
2025 Arah Program
Pertalindo ke Depan

12

Workshop Aspek
Sosialbud:
Menjawab Masalah
Sosial

23

Workshop
Pemeliharaan
Kompetensi Penyusun
Amdal

24

Kabar Dari DPP KALTIM
DPP Kaltim Ngobrol
Bareng bersama Kadis
LH Kota Samarinda

15

IKN dan Masa Depan
Kalimantan

21

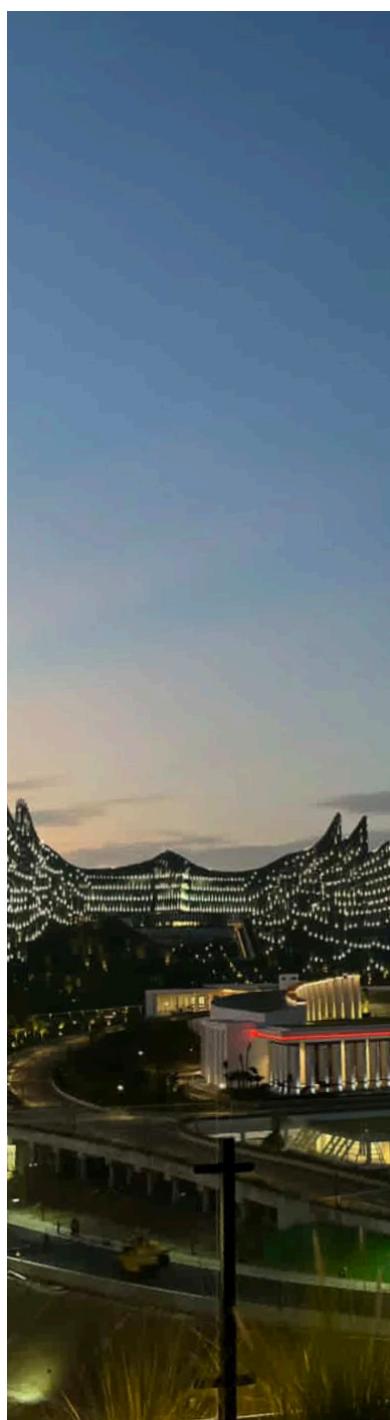
Kota Samarinda
dengan Lingkungan
Sungai dan Tambang

22

Kota Palangkaraya
Dengan bundaran
besar bersiap
menyangga IKN

18

KOLOM



16

Sejarah Kota dan IKN

20

OPINI



18

Waspadalah dengan:
“Gegar Ekosistem”

25

Lingkungan Hidup Kota
Samarinda
Pengalaman Seorang
Kadis Mengelola
Lingkungan Hidup
Ir. Endang Liansyah, MP

25

TOKOH



26

BAKTI LINGKUNGAN
HIDUP
Partisipasi Alumni IPB
Untuk Lingkungan
Hidup di Kota
Samarinda

27

Ir. Kifyatul Akhyari,
Penggerak Pelestarian
Ekosistem Sungai Kota
Samarinda

28

MISMAN
“Manusia Sungai” dari
Samarinda, Penerima
Kalpataru 2023

Menyongsong MUNAS 2025 ERA BARU KEPEMIMPINAN PERTALINDO

Munas (Musyawarah Nasional) Pertalindo 2025 yang akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 ini, merupakan ajang demokrasi Pertalindo (Perhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia). Bagi warga Pertalindo MUNAS 2025 adalah hak menentukan siapa yang akan pemimpin DPN (Pengurus Dewan Pimpinan Pusat) untuk periode mendatang.

Untuk itu, MUNAS 2025 bisa disebut Upaya Pertalindo menyambut ERA BARU KEPEMIMPINAN PERTALINDO.

Menyongsong Pesta Demokrasi tersebut, berbagai pesan terucap dari beberapa anggota Pertalindo, baik dari DPP-DPP maupun dari DPN. Berikut cuplikan pesan dan harapan tersebut:

Apa pesan DPP?



"Munas PERTALINDO, Merangkai Gagasan, Menjaga Kelestarian"

-Herianto dari DPP Kaltim



"Dari kita, oleh kita, untuk kita dan lingkungan berkelanjutan, Sukseskan Munas Pertalindo"

-Aniek Hindrayani dari DPP Yogyakarta



"Pertalindoku Maju Pantang Mundur"

- Jonis Ginting Ketua DPP Sumut



"Memperkuat kolaborasi antar Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia dalam bertukar ide, memperluas jaringan dan menciptakan solusi yang berdampak"

-Yusnaini dari DPP Sulawesi Tenggara



"Semoga terpilih kader terbaik untuk memimpin Pertalindo yang lebih berjaya"

-Ilan R. Suriadi dari DPN



"Munas PERTALINDO menjadi tonggak strategis dalam membangun sinergi profesi menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing, unggul dan berkelanjutan."

-Lusia Widiastuti dari DPP Kalteng



"Pertalindo, dari kita, oleh kita, untuk kita dan lingkungan yang berkelanjutan, jayalah Pertalindo"

-La Ode Ngkoimani dari DPN



"Apa yang sudah diberikan oleh Pertalindo dalam perubahan peraturan perundang-undangan di bidang LH khususnya Tata Kelola Persetujuan Lingkungan".

-Zulham Rizanur dari DPP Banten



"Selamat dan Sukses Munas III Pertalindo, semoga jaya selalu"

-Sulbi dari DPP Kepri



"Bersatu untuk pertalindo".

-Zulkifli Ali dari DPN



Pertalindo adalah keluarga. disini kita belajar dari kakek, ayah, ibu, tante, adik dan kakak. belajar dari kesalahan utk bangkit dan move on

-Christian Pasaribu dari DPN



"Keberlanjutan adalah janji sunyi kita kepada bumi, bahwa esok masih layak untuk dijalani oleh generasi yang belum lahir".

-Erwin Azizi Jayadipraja dari DPP Sulawesi Tenggara



"Semoga Munas PERTALINDO berjalan lancar dan sukses"

-Atra Romeida dari DPP Bengkulu



"Sukseskan Munas Pertalindo sebagai momen memperkuat peran ahli lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan"

-Bu Nila Sari dari DPP Banten



"Belum ada komentar"

-Pak Eddy Irawan dari DPP Jabar

Prosedur dan Jadwal Penjaringan serta Pemilihan Ketua Umum Pertalindo Periode 2025-2030 yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Ketua Umum dapat dilihat pada papan jadwal berikut:



Pembaca Setia Swara Pertalindo



Kadis LH Batanghari



Direktur ITM



Kadis LH Provinsi Jambi

MUNASSUS PERTALINDO: “PERUBAHAN AD DAN ART PERTALINDO”



Pada tanggal 28 Juni 2025 telah berlangsung Munassus Pertalindo dengan agenda tunggal membahas perubahan AD dan ART Pertalindo. Pelaksanaan Munassus tersebut sesuai dengan amanat yang disepakati Rakernas 17 Mei 2025.

Berdasarkan kajian DPN terhadap AD dan ART yang disetujui Munas 2021, didapati banyak hal yang tidak sinkron antara AD dan ART sehingga sulit mengimplementasikannya. Hal ini mungkin disebabkan karena keterbatasan waktu ketika pembahasan AD dan ART tersebut. Informasi tersebut telah dibawa ke Rakernas 2022 dimana Rakernas 2022 meminta agar hal tersebut dibawa ke Munassus.

Rakernas 17 Mei 2025 kembali menetapkan agar pembahasan AD dan ART tersebut dilakukan secara khusus (maksudnya tidak dalam Munas) agar memberi waktu yang cukup dalam pembahasannya sehingga diperoleh hasil yang baik. Memperhatikan kesibukan anggota di bulan Mei, maka Rakernas meminta agar Munassus dilakukan secara daring.

Alhamdulillah, Munasus berjalan dengan baik dan menyetujui serta menetapkan AD dan ART Pertalindo yang baru. Point penting pada AD dan ART yang baru ini adalah membuka keanggotaan pertalindo tidak hanya kepada orang yang mempunyai kopetensi Amdal dan Auditor, tetapi terbuka kepada setiap orang yang berprofesi dalam lingkungan hidup. Keberanian Pertalindo membuka diri menerima setiap orang yang berprofesi di bidang lingkungan hidup untuk bergabung merupakan langkah besar dalam memajukan pertalindo ke depan. Pertalindo tidak lagi merupakan kelompok yang ekslusif tetapi kelompok yang mengayomi setiap orang yang berprofesi lingkungan hidup.

Point lain yang patut di apresiasi adalah masa bakti kepemimpinan ketua umum, yang sebelumnya empat tahun, dijadikan lima tahun. Diharapkan agar cukup waktu bagi ketua umum yang terpilih untuk melaksanakan program kerjanya dalam memajukan pertalindo ke depan. Semoga Pertalindo dengan AD dan ART yang baru ini dapat bergerak lebih lincah dengan anggota yang lebih banyak. Aamiin.

Sambutan Ketua Umum

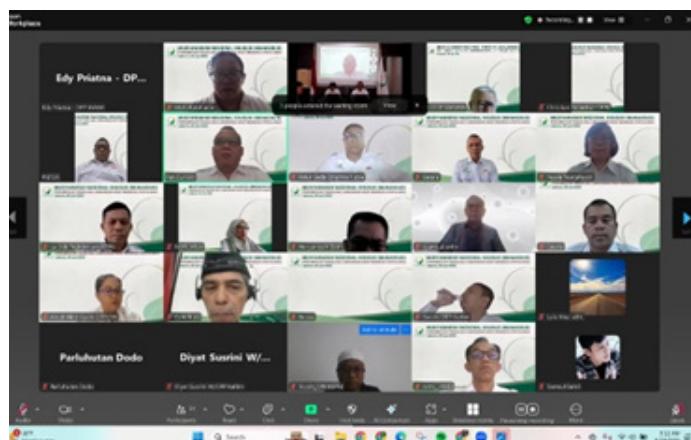
Munasus (Musyawarah Nasional Khusus) Pertalindo yang dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 28 Mei 2025 dihadiri oleh Pengurus DPN dan Pengurus DPP yang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia secara daring.

Menurut Ketua Umum Pertalindo Ir. Ilan R.Suriadi tujuan dilaksanakan Munasus adalah untuk membahas dan menetapkan perubahan AD dan ART Pertalindo sehingga dapat memperpendek waktu pelaksanaan MUNAS 2025 nanti, karena dari pengalaman empiris pada dua Munas terdahulu, waktu yang diperlukan dalam membahas AD dan ART tidak cukup satu hari.

Dengan di bahasnya perubahan AD dan ART di Munassus ini, maka agenda MUNAS 2025 tinggal tiga yaitu: Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum masa bakti 2021-2025; Pembahasan Garis Besar Rencana Kegiatan 2021-2030, dan Pemilihan Ketua Umum Pertalindo masa bakti 2025-2030. Untuk itu, dapat dipahami Munasus menjadi kegiatan penting karena akan menentukan arah dan tujuan Pertalindo ke depan.

Ir.Ilan R.Suriadi mengatakan bahwa "Saya sebagai Ketua Umum Pertalindo telah dua Periode berturut-turut (Periode 2017-2021 dan Periode 2021-2025) sesuai Anggaran Dasar Pertalindo tidak dapat dipilih lagi. Untuk itu, Saya mengharapkan dalam Munas 2025 nanti tokoh-tokoh Pertalindo yang potensial dapat terjaring dan terpilih menjadi Ketua umum sehingga dapat membawa Pertalindo ke depan semakin Berjaya".

Sidang Munassus (Musyawarah Nasional Khusus) dipimpin oleh Dr.Ir.La Ode Ngkoimani, MT, dibantu oleh Ir. Dodi Trianto sebagai Wakil Pimpinan Sidang dan Betara Hendro sebagai Sekretaris. Setelah mendengar masukan-masukan dari peserta menyetujui perubahan AD dan ART Pertalindo dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2025.



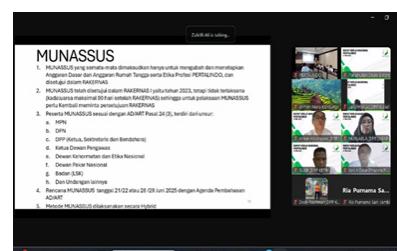
Peserta rapat online dari berbagai provinsi

Acara Munassus dilaksanakan secara hybrid dimana sebagian dari peserta hadir di Ruang Utama secara luring dan peserta Munassus lainnya mengikuti via zoom meeting. Bagaimana pun menurut Sekjen Pertalindo Ir.Zulkifli Ali, M.Si kita memanfaatkan teknologi informatika canggih ini karena dapat memudahkan kita sehingga tidak peserta di pusat saja yang bisa mengikuti, peserta yang jauh pun dapat mengikuti, bahkan yang sibuk pun bisa mengikuti dengan baik.

Terkait Munas 2025 Sekjen Pertalindo 2020-2025 Ir. Zulkifli Ali, M.Si Munas 2025 nanti dilaksanakan secara luring di Jakarta dan akan dihadiri oleh Pengurus DPN dan DPP di seluruh Indonesia. Untuk melengkapi acara MUNAS 2025 juga akan diadakan Seminar Nasional dengan mengambil Topik : Menakar Kesaktian Undang-Undang No 18 tahun 2008 dan PP No.81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga dan jenis sampah rumah tangga. Diharapkan seminar ini dapat menggali apa permasalahan utama dari pengelolaan sampah di indonesia. Rencananya MUNAS 2025 dan Seminar Nasional ini akan langsung dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup RI.

Ada 3 pembicara dalam seminar tersebut yaitu: Direktur Pengelolaan sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Prof.Ir. Zainal Abidin,M.Sc, Ph.D Guru Besar dari ITB Bandung, dan Bupati Kabupaten Banyumas.

Khusus untuk Acara Seminar Nasional Panitia akan mengundang secara daring seluruh anggota Pertalindo, dinas lingkungan hidup Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia serta pemerhati persampahan di Indonesia.



Penayangan beberapa poin-poin penting dalam Munasus



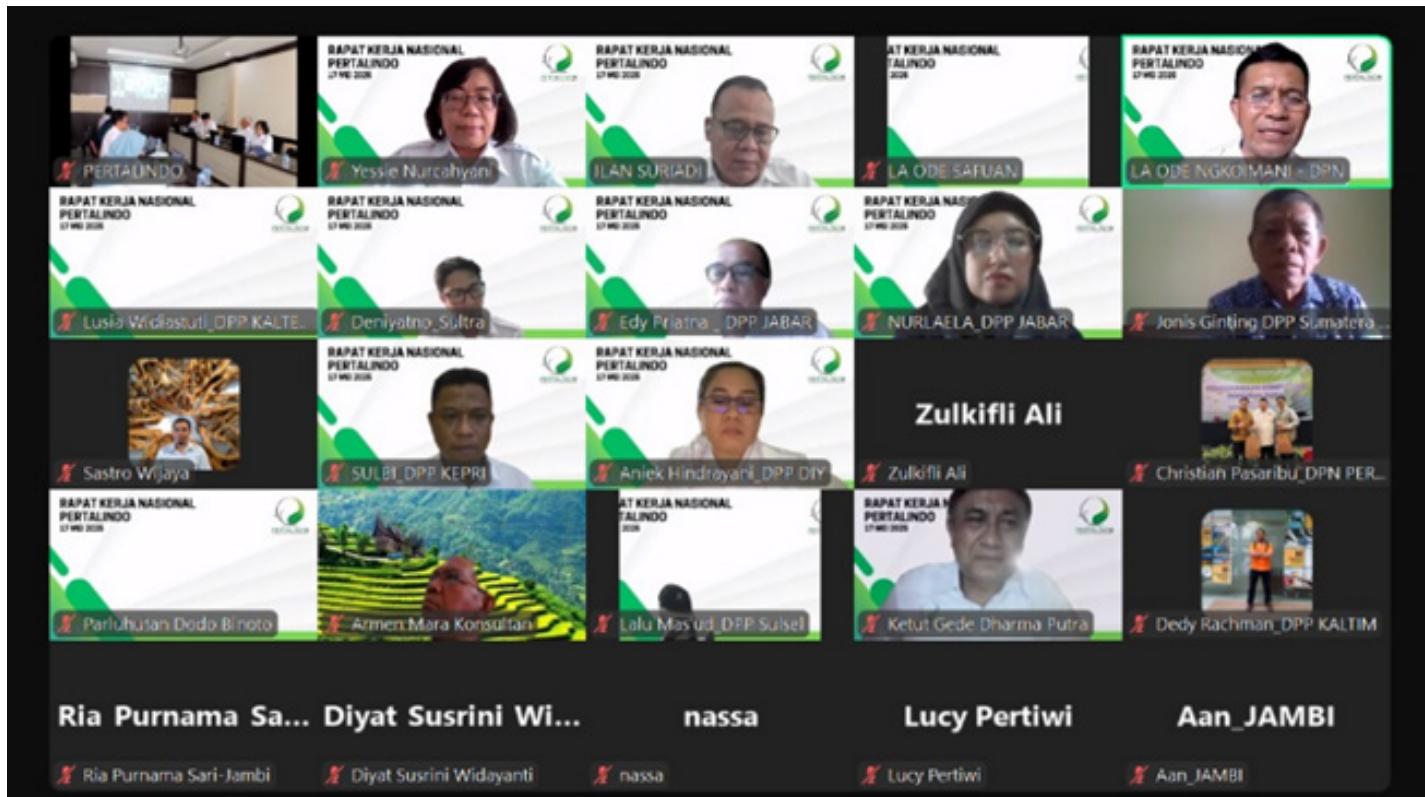
Suasana dialog dalam Rapat Munasus



Suasana dialog dalam Rapat Munasus



Pembawa Acara dalam acara pembukaan



RAKERNAS PERTALINDO 2025: *Arah Program Pertalindo ke Depan*

Ketua umum Pertalindo Periode 2020-2025 Ir. Ilan R. Suriadi dalam Sambutannya pada Rakernas Pertalindo yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Mei 2025 dari Jam 09.00 -12.00 WIB menyatakan bahwa ada dua hal pokok yang akan dibahas dalam Rakernas tahun 2025 ini, yaitu Munasus dan MUNAS.

Sementara itu, Sekjen Pertalindo Ir.Zulkifli Ali, M.Si menambahkan bahwa MUNAS 2025 dilaksanakan untuk memilih Pengurus DPN Pertalindo Periode 2025-2030. Sedangkan Munassus dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan perubahan anggatan dasar dan anggaran rumah tangga Pertalindo sehingga sangat membantu efisiensi waktu Ketika MUNAS 2025 nantinya.

Rakernas Pertalindo yang dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 17 Mei 2025 secara aklamasi menetapkan tanggal dan waktu MUNASUS Pertalindo yaitu akan dilaksanakan pada Tanggal 28 Juni 2025 secara luring mulai pukul 09.00 WIB dan akan dihadiri oleh Pengurus DPN dan 14 DPP yang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia. Munassus tersebut menurut Ketua Umum Pertalindo Ilan R.Suriadi hanya dengan satu agenda tunggal yaitu Perubahan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pertalindo. Selain itu Ketua Umum mengingatkatkan jajarannya dengan



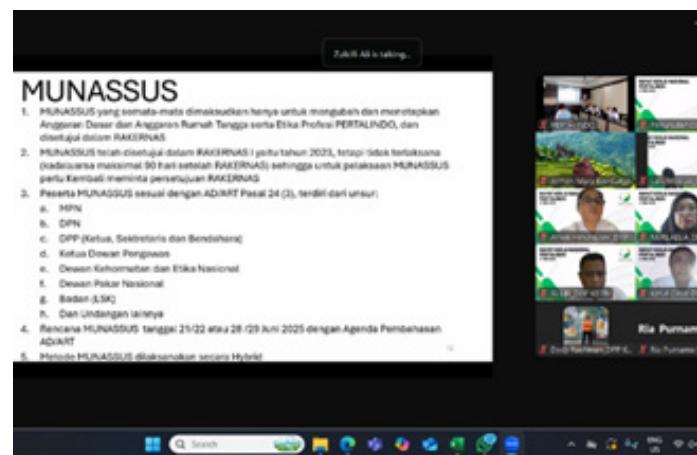
semakin dekatnya pelaksanaan Munas dan agar mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan dalam MUNAS 2025.

Rakernas 2025 dilaksanakan secara hybrid dengan berpusat di Kantor PertaLindo Kawasan Pulo Gebang Jakarta dihadiri oleh beberapa orang Pengurus DPN dan DPP. Peserta lainnya mengikuti Rakernas secara online melalui zoom meeting dari lokasi masing-masing.

Ketua Umum Pertaindo Periode 2025-2030 menyampaikan bahwa MUNAS 2025 akan dilaksanakan sekitar Bulan Agustus 2025 yang akan datang adalah forum untuk memilih Kepengurusan Baru DPN PertaLindo Periode 2025-2030. Untuk itu, dapat dipahami bahwa MUNAS 2025 merupakan kegiatan penting, yaitu akan menetapkan penentu kebijakan-kebijakan PertaLindo ke depan.



Christian Pasaribu sebagai pembawa acara sedang membuka acara



Dasar-dasar pelaksanaan Munasus

Saya sudah memegang jabatan Ketua Umum PertaLindo untuk dua Periode (Periode 2015-2020 dan Periode 2020-2025) dan sesuai Anggaran Dasar PertaLindo Saya tidak dapat dipilih lagi. Untuk itu, saya mengharapkan kawan-kawan dan tokoh-tokoh PertaLindo yang potensial dapat terjaring untuk menjadi calon Ketua Umum periode mendatang.

kepada LSK untuk menjadi dasar keberlanjutan berlakunya sertifikat kompeten Penyusun Amdal yang bersangkutan.

Selamat tinggal Kabinet Indonesia Maju, selamat datang kabinet yang baru.... Semoga kita semua dapat berperan aktif untuk mengelola lingkungan bagi pembangunan yang berkelanjutan



Lagu Indonesia Raya bekumandang



Lagu mars PertaLindo pun bergetar

WORKSHOP ASPEK SOSEKBUD:

Menjawab Masalah Sosial



Direktur PDLUK, Dra.CH.Nety Widawati.MT sebagai Keynote speaker

Direktur PDLUK (Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan) Kementerian Lingkungan Hidup, Dra. CH.Nety Widawati.MT ditengah kesibukannya menyempatkan datang untuk memberi sambutan pada acara Workshop Sosekbud. Workshop Sosekbud (Sosial Ekonomi dan Budaya) dilaksanakan oleh Pengurus Nasional Pertalindo selama 1 hari penuh di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Direktur PDLUK menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup khususnya PDLUK mengucapkan trimakasih kepada Pertalindo terhadap kerjasamanya dalam mengawal pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. PDLUK mendukung Workshop-worksop seperti ini sehingga dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan para penyusun Amdal. Disampaikan permasalahan sosial memang merupakan masalah utama dan terberat untuk diselesaikan, oleh karena itu mengharapkan agar workshop Sosekbud ini dapat menjawab persoalan-persoalan social yang muncul dalam masyarakat

sehingga dapat diterapkan dalam pengelolaan dampak lingkungan. Direktur juga menyampaikan berbagai permasalahan yang sering muncul ketika pembahasan substansi Amdal bersama TUK, dan PDLUK selalu melakukan evaluasi dan koreksi sehingga pembahasan substansi Amdal lebih efisien dan efektif tidak berlama-lama seperti terjadi dimasa lalu. Workshop dilaksanakan dengan menampilkan 5 orang pembicara dan dihadiri oleh anggota Pertalindo



Foto: Ir. Ilan R. Suriadi Ketua Umum Pertalindo

Sambutan Ketua Umum

Dalam studi Amdal, manusia merupakan komponen penting dan unik, yakni penerima dampak secara langsung maupun sebagai muara dampak lainnya, juga keunikan karena reaksi terhadap dampak tidak sama antara satu situasi social dengan dengan situasi social lainnya Untuk itu komponen social seharusnya mendapat perhatian yang lebih dengan argumentasi bahwa sebelum tahun 2022 terdapat paradigma "satu pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat", namun setelah tahun 2022 paradigma tersebut lebih maju lagi yakni, "bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat" (UNDP, 2022).

Studi Amdal yang sejatinya menjadi tumpuan dalam menjamin "kualitas hidup masyarakat" akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan,

sering sekali menjadi business as usual. Dibuat seadanya, pakai template studi lain tanpa memperhatikan keunikan aspek social setempat. Kalau sudah begini jangan kan merumuskan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Studi tersebut pasti hanya sampai pada taraf seperti ungkapan "*pokoknya tidak ada protes atau demo dari masyarakat*".

Pertalindo sebagai perkumpulan tenaga ahli lingkungan hidup sesuai mandatnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggotanya dalam penyusunan Amdal yang lebih berkualitas, melakukan serangkaian Workshop. Pada seri ini, khusus membahas aspek social ekonomi budaya, mulai dari awal tentang kesenjangan dalam pelaksanaan pelibatan masyarakat hingga kesenjangan dalam menentukan prakiraan dampak pada aspek social.



Panel I: Pelibatan Masyarakat Dalam Amdal Pembicara I (Prof.Dr. SUDHARTO P. HADI)

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi tampil sebagai pembicara pertama, dengan judul makalahnya "Pelibatan masyarakat dalam Amdal". Memulai pembicaraan dengan pengertian pelibatan masyarakat, pelibatan masyarakat menurut UU Cipta Kerja, apa sebenarnya hak dan kewajiban masyarakat, dan apa pula kewajiban instansi terkait, Apakah proses penyusunan Amdal bertentangan dengan ketentuan-ketenetuan dalam UU Cipta Kerja? Walaupun beliau tampil secara online namun tetap menarik dan komunikatif.

Pembicara II (Dr. Ir. Armen Mara, MSi)

Dr. Ir. Armen Mara, MSi tampil sebagai Pembicara II dengan judul makalah "Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan proyek". Seorang penyusun Amdal dengan latar belakang akademisi

memaparkan makalahnya terutama untuk menjawab pertanyaan "mengapa muncul complain, protes, dan konflik fisik di tengah masyarakat".



Dr.Ir.Armen Mara, M.Si

Sesuai bidangnya Sosekbud, beliau memulai kajian nya dengan pentingnya investasi, harapan masyarakat, serta pelaksanaan Amdal di Indonesia. Menurut Armen Mara, pelibatan masyarakat di Indonesia masih dibatasi pada tahap perencanaan saja (penyusunan AMDAL) pada hal lebih penting pada tahap implementasi dan evaluasi.

Pelibatan masyarakat dalam proyek-proyek Amdal sudah mulai sejak pertama sekali mereka menerima informasi bahwa di lingkungan mereka akan dibangun proyek besar yang tentu akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Informasi tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan proses berpikir yang terjadi secara psikologis dalam diri seorang individu masyarakat. Proses berpikir tersebut akhirnya melahirkan suatu keputusan dalam bentuk sikap yang menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap rencana proyek tersebut.

Sikap "setuju" yang dinyatakan seseorang terhadap suatu rencana proyek akan membuka dirinya untuk bekerjasama (assosiative) dengan pihak proyek dan sebaliknya sikap "tidak setuju" terhadap proyek akan membuat diri nya mengalami "konflik" dengan pihak proyek. Konflik tersebut bisa dalam bentuk paling ringan seperti "gelisah" dan bisa juga dalam bentuk "protes" melalui kgiatan demonstrasi dia lakukan, dan bisa juga dalam bentuk yang lebih berat yaitu konflik fisik dalam bentuk "serang-menyerang" antara masyarakat dan pihak proyek.

Pembicara III (Ir.Ilan R.Suriadi)

Ir. Ilan R. Suriadi tampil sebagai pembicara ke tiga, tampil dengan judul makalahnya "Melibatkan Masyarakat dalam ProsesAmdal". Beliau melakukan kajian-kajian Sosekbud yang bersifat normative dengan mendasarkan pemikiran pada PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH dan SKKNI No 122 tahun 2016 tentang Amdal, menekankan pentingnya kajian Sosekbud dilaksanakan secara mendalam dan berdasar pada aturan-aturan Amdal yang berlaku di Indonesia, khususnya dua aturan hukum yang disebutkan diatas.

Panel II: Dampak – dampak Sosial yang Relevan Dalam Amdal

Panel ke II dalam workshop Sosekbud ini mengkaji dampak-dampak Sosial yang Relevan Dalam Amdal. Betara Hendro, S.Sos, M.Si tampil sebagai Pembicara I pada Panel II ini yang mengambil judul makalah "Prakiraan dampak sosial" yang memandang masyarakat sebagai suatu bagian dari ekosistem. Perubahan dari salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya.

Kajian dalam aspek Sosekbud menjelaaskan bahwa manusia adalah penyebab dampak dan sekaligus juga terkena dampak. Untuk itu, pendekatan terhadap manusia perlu dilakukan dengan

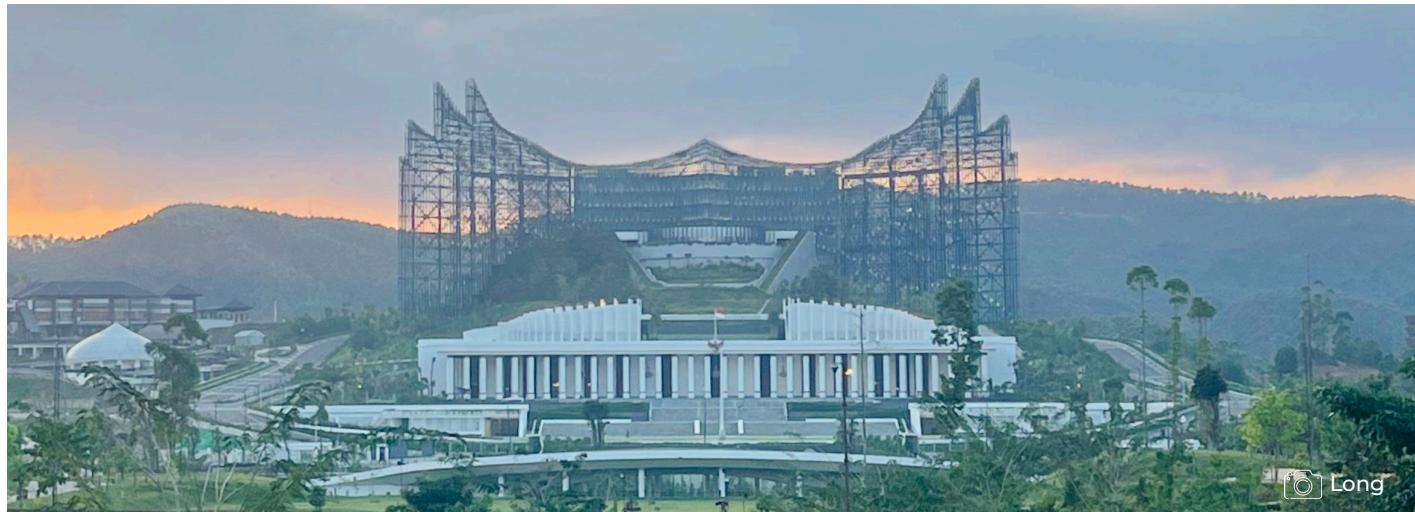
pendekatan manusiawi dan tidak pendekatan teknis semata-mata. Secara umum dampak dalam aspek Sosekbud terdiri tiga komponen dampak yaitu komponen kependudukan, komponen ekonomi dan komponen budaya



Ir.Zulkifli Ali, M.Si

Sebagai pembicara II dalam Panel II ini adalah Ir.Zulkifli Ali yang tampil dengan gaya ninik mamak, setelan baju kemeja dan memakai peci warna hitam. Membawakan makalah dengan judul makalah "Dampak-dampak sosial yang relevan dalam Amdal". Ir. Zulkifli Ali, M.Si memulai pembicaraan nya dengan mengutip beberapa pernyataan seorang guru besar lingkungan hidup, Prof.Dr. Emil Salim. Pembicara ini mengkritik beberapa konsep yang dicampur adukkan. Diantaranya sering dipertukarkan antara tujuan dan dampak. Hal ini tentu akan membuat hasil kajian menyimpang dari alur yang diinginkan. Seterusnya menurut Zulkifli, kajian Amdal sering melupakan bahwa fungsi Amdal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian mestinya ahli sosial lebih mengarahkan prakiraan dampaknya kepada parameter-parameter kesejahteraan tersebut. Pada akhir pemaparan, penyaji menyampaikan enam hal yang harus diperhatian penyusun Amdal dalam menetapkan nama dampak. Hal ini nampaknya berkaitan dengan keprihatinan para penyusun Amdal terhadap fenomena banyaknya nama-nama baru dampak (khususnya dampak sosial) seperti "Dampak pengotoran jalan"; "dampak Timbulan Sampah", "dampak Gangguan Lingkungan" dst yang membuat heboh kalangan penyusun Amdal.

IKN DAN MASA DEPAN KALIMANTAN



Secara administrasi IKN (Ibu Kota Nusantara) yang sedang dibangun tersebut berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur. Dari Balik Papan, Lokasi tersebut dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu 2 jam 11 menit (115,7 km) melewati Jl. Ahmad Yani dan Jl. Tol Balikpapan – Samarinda.

Lokasi tersebut sebagai lokasi pembangunan IKN ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Bawa sesuai Undang-undang Nomor 21 tahun 2023 Pasal 6 bahwa (1) Posisi Ibu Kota Nusantara tersebut secara geografis terletak pada:

- Bagian Utara pada $117^{\circ} 0' 20,102''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 38' 20,578''$ LS
- Bagian Selatan pada $117^{\circ} 11' 51,546''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 15' 31,780''$ LS
- Bagian Barat pada $116^{\circ} 31' 31,180''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 0' 14,822''$ LS dan
- Bagian Timur pada $117^{\circ} 18' 25,590''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 6' 32,773''$ LS.

Sesuai Undang-Undang tentang IKN, lokasi tersebut meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 ha (dua ratus lima puluh dua ibu enam ratus enam puluh hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 ha (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:

- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa

Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar.

Wilayah darat Ibu Kota Nusantara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang tentang IKN meliputi:

- Kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.159 ha (lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan hektare); dan
 - Kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 196.501 ha (seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus satu hektare).
- Kawasan IKN direncanakan akan dibagi menjadi 3 Zonasi yaitu:

- Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dengan luas sekitar 5.600 Ha
- Kawasan Ibu Kota Negara dengan luas sekitar 56.000 Ha (termasuk kawasan inti Pusat Pemerintahan)
- Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara dengan luas sekitar 256.142,74 Ha (Bappenas, 2020)

Kawasan Ibu Kota Negara sendiri dibagi atas 6 Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yaitu:

- BWP I (Pusat) Pusat Pemerintahan
- BWP II (Barat) Pusat Ekonomi
- BWP III (Selatan) Pusat Pemerintahan
- BWP IV (Tenggara) Pusat Hiburan
- BWP V (Timur) Pusat Pendidikan
- BWP VI (Utara) Pusat Inovasi & Riset

Demikian gambaran umum lokasi IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaliman Timur yang sekarang pada umumnya dalam tahap penggerjaan fisik.

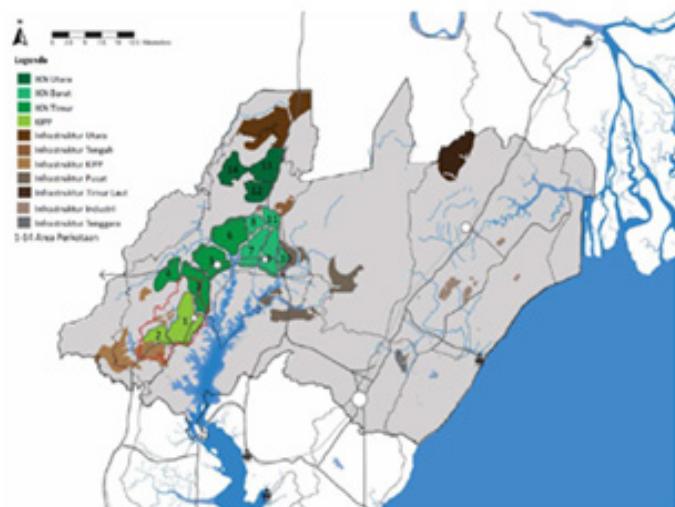


SEJARAH KOTA DAN IKN

Dr.Ir.Armen Mara,M.Si*)

*) Dosen Universitas Jambi/Ketua DPP Pertalindo Jambi/ATPA

Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah memancing isu-isu kontroversial, sebanyak yang pro pembangunan dilanjutkan dan sebanyak itu pula yang minta dihentikan pembangunannya. Tulisan ini akan mencoba berkaca pada pengalaman perkembangan kota-kota di dunia dan di Indonesia serta melihat perspektif perkembangan IKN di masa depan.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Teori perkembangan kota di dunia menjelaskan bahwa kota-kota di dunia pada umumnya mengikuti 3 (tiga) pusat pengembangan kegiatan, yaitu sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan, dan sebagai pusat Pendidikan. Dalam ilmu perencanaan pengembangan kota, ketiga sector ini disebut dengan leading sector (sector penggerak) bagi berkembangnya sector-sektor ekonomi lainnya.

Namun, sesudahnya kota berkembang menjadi kota majemuk atau pusat segala kegiatan. Kota tidak hanya menjadi gabungan pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, dan pusat kegiatan Pendidikan melainkan juga sebagai pusat kegiatan wisata, perkembangan teknologi, seni dan budaya, dan mode atau gaya masyarakat terkini.

Negara Amerika Serikat adalah suatu contoh bahwa Ibu Kota Negara tersebut adalah Washington DC namun, pusat perdagangannya adalah New

York, dan Perkembangan Pendidikan lebih pesat di Boston. Pada saat ini Boston merupakan salah satu kota Pendidikan terbaik di dunia versi Versi QS WUR 2023. Contoh lain adalah Negara Jepang yang menempatkan ibu kota pemerintahannya di Tokyo, sedangkan pusat perdagangan nya adalah Osaka yang memiliki pelabuhan laut terbesar. Namun, perkembangan Pendidikan di Jepang lebih terkenal di Kyoto.

Sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia tidak jauh berbeda dari perkembangan kota di negara-negara lain. Jakarta pada awalnya bernama Sunda Kelapa dan Batavia. Pada waktu itu Jakarta dikenal sebagai pusat perdagangan, yaitu pelabuhan Sunda Kelapa kemudian dikembangkan menjadi pusat pemerintahan pada zaman Belanda dan diteruskan sebagai pusat Pemerintah Negara Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta.

Sejak itu perkembangan Kota Jakarta sangat pesat bahkan luar biasa. Semua orang di Indonesia berkeinginan tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta serba ada dan serba lengkap. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memiliki pegawai negara yang semakin lama semakin banyak. Bagi pedagang ini adalah konsumen sehingga semakin banyak pula orang datang ke Jakarta untuk berdagang. Lalu pengelola Pendidikan di melihat banyaknya penduduk di Jakarta juga memerlukan kuantitas dan kualitas Pendidikan yang lebih tinggi sehingga Pendidikan pun berkembang. Seterusnya Kota Jakarta memenuhi semua permintaan masyarakat yang semakin beragam sehingga Kota Jakarta pun berkembang menjadi Kota Majemuk. Penduduknya melebihi daya tampung dan bahkan akhirnya menjelma menjadi Kota Yang Semrawut.

Berbeda dengan Jakarta, perkembangan kota-kota lain di negara maju, mungkin karena sejak awal sudah memiliki perencanaan kota sehingga perkembangannya terlihat lebih teratur dan lebih nyaman bagi penghuninya. Sektor-sektor tertentu yang memiliki daya gerak yang kuat, seperti perdagangan dan Pendidikan kemudian dipisahkan dengan ibu kota negara, yaitu dialihkan ke kota lain sehingga kalau pun ibu kota negara berkembang menjadi kota majemuk tetapi masih bisa dikendalikan sehingga tidak semrawut.

Presiden Jokowi pada periode yang lalu, mungkin mengingat Jakarta yang semakin semrawut tersebut, Beliau perlu merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut ke Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Lokasi yang boleh dikatakan masih sepi dari kehidupan manusia bahkan boleh dikatakan masih merupakan hutan belantara akan dijadikan lokasi tempat pindah Ibu Kota Negara.

Dari tiga leading sector penggerak ekonomi kota tersebut memang pusat pemerintahan lah yang paling mudah dan praktis untuk dipindahkan. Secara teknis pusat pemerintahan suatu negara bisa saja dipindahkan dalam waktu relative singkat. Seperti yang dilakukan oleh negara Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Kota Putra Jaya yang lokasinya tidak begitu jauh dari lokasi semula masih berada dalam medan magnit Kuala Lumpur.

Ketika Presiden Soekarno mengullirkan gagasan pemindahan pusat pemerintahan ini pada tahun 1960an masih mungkin untuk dilakukan mengingat beban berat yang mau dipindahkan itu belum begitu berat dan daya tampung pulau Kalimantan pada waktu masih cukup untuk menerimanya. Namun, kalau pemindahannya dilakukan sekarang tentu akan menimbulkan dampak-dampak besar dan penting di lokasi yang baru., khususnya dampak terhadap fisik-kimia, biologi, ekologi atau ekosistem, Sosbud dan Kesmas. Dampak lain yang sangat mengkhawatirkan adalah dampak politik, pertahanan, dan keamanan.

Saat ini, pemindahan ibu kota negara ini bukan lagi rencana melainkan sudah sudah dimulai pembangunannya sejak akhir masa Jabatan Jokowi. Apa solusi yang tepat untuk tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar untuk negara?

Kegiatan pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan, khususnya yang menggunakan dana APBN, seperti pembangunan jalan sebagai sarana transportasi, kantor-kantor pemerintahan, Bandar Udara, dan sarana-sarana umum sebaiknya dilanjutkan. Kalau pembangunan yang menggunakan dana APBN ini dihentikan maka kerugian negara akan mencapai Triliunan rupiah, semua bangunan akan menjadi sarang binatang-binatang liar.



Jangan lupa bahwa lokasi IKN itu tidak jauh dari Kota Samarinda Ibu Kota Kalimantan Timur, yaitu berjarak 123,8 Km atau sekitar 2 Jam 45 Menit dari IKN. Oleh karena itu, kalau pun IKN batal dipindahkan dari Kota Jakarta bangunan IKN yang sudah diselesaikan akan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi IKN akan menarik bagi wisatawan yang masuk dari gerbang Kota Samarinda. Lokasi IKN yang telah menghabiskan dana ratusan triliun rupiah tapi memberikan manfaat apa-apa kepada negara tetap akan menarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan dari lokasi yang dijadikan tempat menbenamkan uang negara tersebut.

Semua bangunan yang diperuntukan bagi kantor kepresidenan sebaiknya tetap direncanakan penggunaannya untuk kegiatan kepresidenan seperti tempat istirahat presiden seperti istana Bogor yang dibangun Soekarno pada zamannya. Pada waktu itu Kota Bogor juga masih sepi. Bisa juga untuk ruang kerja Presiden pada waktu-waktu tertentu. Dapat juga digunakan untuk kegiatan perkantoran menteri-menteri, misalnya kegiatan Menteri Kehutanan, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, mungkin untuk waktu-waktu tertentu.

Penggunaan yang paling memungkinkan adalah untuk perkantoran Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Selagi Presiden masih hidup Wakil Presiden tidak perlu sibuk-sibuk. Jadi Wakil Presiden bisa bersantai-santai dan bersenang-senang saja di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang suasana nya masih asri tapi sepi *).





Waspada lah dengan: “Gegar Ekosistem”

Pembangunan IKN di Mata Dr. Ir. Vera Amelia, M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana

Universitas Palangka Raya

Biografi

Dr. Ir. Vera Amelia, M.Si lahir pada Tanggal 21 Juli 1968. Bekerja sebagai Dosen Ilmu Lingkungan di Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya Tanaman Universitas Palangkaraya sejak tahun 1996. Menamatkan Studi S1 Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar, lulus tahun 1992. Studi S2 Program Studi Magister Pertanian Lahan Kering Universitas Udayana- Denpasar lulus tahun 2002. Studi S3 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2017.

Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) dalam kawasan Provinsi Kalimantan Timur yang membuka lahan dalam skala luas dan dalam waktu yang singkat, telah merubah bentang alam dan penggunaan lahan yang sebelumnya hutan dan pertanian menjadi bangunan untuk perkotaan/permukiman. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak sangat masif, dan drastis (*environmental shock*) terhadap ekosistem di wilayah tersebut. Dampak tersebut akan semakin parah ketika daerah sekitar yang disebut dengan kawan penyangga, juga akan melakukan berbagai pembangunan yang juga merubah tutupan lahan mereka.

Untuk mendapatkan informasi terkini PertaLindo sengaja melakukan wawancara mendalam dengan tokoh / akademisi lingkungan hidup di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah yaitu Ibu Dr. Vera Amelia, sebagai Koordinator Prodi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Palangka Raya.

Berikut wawancara **Zulkifli Ali**, dari dewan redaksi Swara PertaLindo dengan **Dr. Ir Vera Amelia, M.Si**

Apa tanggapan Anda terhadap dampak pembangunan IKN?

Pertama, Perubahan penggunaan lahan dari hutan dan pertanian menjadi perkotaan dalam skala besar seperti IKN memang mengkhawatirkan. Sebagai akademisi yang tinggal di Kalimantan, saya melihat dampak ini sangat signifikan karena hutan tropis Kalimantan yang memiliki biodiversitas tinggi dan fungsi ekologis yang kompleks.

Dampak yang perlu diwaspadai adalah meliputi hilangnya habitat satwa endemik, fragmentasi ekosistem, dan berkurangnya jasa ekosistem

seperti pengaturan tata air dan penyerapan karbon. Kemudian Efek domino ke kawasan penyangga juga akan memicu urban sprawling yang tidak terkendali jika tidak dikelola dengan baik melalui perencanaan tata ruang yang ketat dan implementasi konsep smart growth.

Kedua, karena adanya pembukaan lahan yang luas dalam waktu yang singkat, ada yang mengkhawatirkan timbulnya dampak gangguan terhadap ekosistem yang drastis “ecosystem shock” atau gegar ekosistem, yang terdiri dari gegar ekosistem lingkungan fisik-kimia, gegar ekosistem biologi (vegetasi dan satwa) dan gegar ekosistem sosial ekonomi budaya masyarakat.

Sebentar! Apakah Anda melihat dampak-dampak diatas terkait dengan pembangunan IKN?

Ya, saya mengamati ada beberapa indikasi gegar ekosistem terkait pembangunan IKN, seperti: Gegar Ekosistem Fisik-Kimia, yaitu perubahan drastis pada siklus hidrologi, peningkatan erosi dan sedimentasi, serta potensi pencemaran air dan udara akibat aktivitas konstruksi masif.

Gegar Ekosistem Biologi: yaitu migrasi paksa fauna, kepunahan lokal spesies endemik, dan gangguan rantai makanan. Beberapa spesies primata dan burung Kalimantan yang sensitif terhadap perubahan habitat sudah mulai terganggu pola hidupnya.

Gegar Sosial-Ekonomi-Budaya: yaitu perubahan pola hidup masyarakat Dayak dari subsisten tradisional menjadi sistem pasar, kemudian hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional, dan potensi konflik sosial akibat disparitas ekonomi yang meningkat.

Saya lanjutkan yaa!

Ketiga, Pembangunan suatu kota diharapkan dapat meningkatkan pembangunan/perekonomian daerah-daerah di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pembangunan.

Saya potong! Apakah menurut Anda dampak tersebut terkait dengan dibangunnya IKN?

Pembangunan IKN memang berpotensi memberikan multiplier effect (konsep ekonomi tentang perubahan dalam perekonomian yang dapat memiliki dampak yang lebih besar dari yang diharapkan) positif bagi perekonomian regional. Saya melihat peningkatan kesempatan kerja di sektor konstruksi, jasa, dan perdagangan. Namun, dampak ini belum merata dan cenderung terpusat di sekitar area pembangunan inti.

Yang menggembirakan adalah munculnya usaha mikro dan kecil masyarakat lokal, terutama di bidang penyediaan material lokal dan sektor informal. Namun perlu strategi khusus untuk memastikan masyarakat lokal dapat berpartisipasi secara bermakna dalam ekonomi baru ini, dan bukan hanya sebagai penonton di tanah sendiri.

Keempat, Saya lanjutkan, pembangunan suatu kota akan menjadikan faktor penarik (*pull factor*) dari migrasi masyarakat.

Apa komentar Anda jika hal itu dihubungkan dengan IKN?

IKN sudah menjadi magnet migrasi yang sangat kuat. Data yang saya amati menunjukkan lonjakan signifikan pendatang dari berbagai daerah, terutama Jawa dan Sumatera. Hal ini natural dalam pembangunan kota baru, namun perlu dikelola dengan cermat.

Tantangannya adalah memastikan infrastruktur sosial dan pelayanan publik dapat mengakomodasi pertumbuhan populasi yang eksponensial ini sehingga diperlukan perencanaan *demographic carrying capacity* yang realistik dan sistem monitoring migrasi yang efektif untuk mencegah *urban chaos*.

Saya lanjutkan lagi yaa!

Kelima, banyaknya pendatang akan menimbulkan persaingan (kompetisi) antara penduduk lokal dan pendatang. Biasanya persaingan tersebut tidak seimbang karena pendatang mempunyai *competitive advantage* seperti pengalaman, pendidikan, etos kerja dll. Akibatnya masyarakat lokal akan tersisih/terpinggirkan sehingga harapan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tinggal slogan

Bagaimana Anda melihat dampak tersebut?

Kekhawatiran ini sangat valid dan saya melihat tanda-tanda awalnya. Masyarakat Dayak lokal memang menghadapi *competitive disadvantage* dalam hal pendidikan formal, jaringan bisnis, dan akses modal. Mereka berisiko menjadi “*tourist in their own land*” (turis di negeri sendiri).

Solusi yang harus ditempuh adalah *affirmative action* melalui program pemberdayaan khusus seperti skema kredit mikro untuk masyarakat lokal, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan IKN, dan reservasi kuota untuk tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek pembangunan. Penting juga mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai nilai tambah dalam pengembangan pariwisata budaya.

Keenam, Saya lanjutkan, bahwa dampak pembebasan lahan/pengadaan lahan adalah dampak yang sangat sulit mengurainya. Banyak kasus lahan yang berlarut-larut tidak selesai karena para pihak tidak merasa memperoleh keadilan.

Apakah Anda punya ide tentang kearifan lokal yang dapat digunakan untuk pengadaan lahan dalam kasus IKN?

Masyarakat Dayak memiliki konsep “*Belom Bahadat*” (Hidup Beradat) yang sangat relevan untuk pengadaan lahan yang berkeadilan. Konsep ini menekankan pada musyawarah mufakat, transparansi, dan *win-win solution*.

Dalam konteks IKN, kearifan lokal yang dapat diterapkan antara lain: sistem “*Handep Hapakat*” (gotong royong) untuk proses negosiasi kolektif, konsep “*Hadat*” (adat) yang mengatur hak komunal atas tanah, dan tradisi “*Mambagi Hasil*” (pembagian hasil) yang dapat dimodifikasi menjadi skema revenue sharing jangka panjang bagi masyarakat yang melepas tanahnya.

Ketujuh, seterusnya dalam pengadaan lahan IKN pemerintah membentuk lembaga “Bank Tanah”.

Oh ya tentang Bank Tanah, Apakah menurut Anda Bank Tanah tersebut dapat membantu pengadaan lahan yang berkeadilan?

Iya, saya tahu. Bank Tanah merupakan inovasi kelembagaan yang menarik untuk mengatasi kompleksitas pengadaan lahan. Dari perspektif akademis, konsep ini berpotensi mengurangi spekulasi tanah dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Namun, efektivitas Bank Tanah untuk keadilan sangat tergantung pada implementasinya. Diperlukan transparansi dalam penetapan harga, partisipasi masyarakat dalam governance, dan

mekanisme benefit sharing yang jelas. Tanpa itu, Bank Tanah bisa menjadi alat yang melanggengkan ketimpangan.

Menurut Anda, Dampak apa yang perlu diperhatikan dalam pembangunan suatu kota baru?

Berdasarkan pengalaman global dan regional, dampak yang perlu mendapat perhatian khusus adalah:

Daya Dukung Lingkungan yaitu daya dukung ekosistem lokal harus menjadi batasan utama dalam menentukan skala dan kecepatan pembangunan.

Hubungan Sosial yaitu integrasi sosial antara pendatang dan masyarakat lokal perlu difasilitasi melalui ruang-ruang interaksi yang terencana.

Ketahanan Iklim yaitu adaptasi terhadap perubahan iklim harus diintegrasikan sejak awal, terutama terkait bencana banjir dan kekeringan yang sering terjadi di Kalimantan.

Kapasitas Kelembagaan yaitu kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola transformasi yang masif ini perlu diperkuat secara signifikan.

Apa saran Anda terkait dengan pembangunan IKN.

Saran untuk Pembangunan IKN
Sebagai akademisi dan praktisi lingkungan, saya menyarankan:

1. Penerapan Konsep Kota Hijau secara konsisten dengan target minimal 30% ruang terbuka hijau dan 40% dari luasan IKN tetap sebagai kawasan konservasi.
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat Lokal melalui pembentukan forum multi-stakeholder yang melibatkan tokoh adat, akademisi lokal, dan *civil society* dalam pengambilan keputusan strategis.
3. Adaptasi Berbasis Ekosistem dengan memanfaatkan solusi berbasis alam untuk mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4. Program Pengembangan Kapasitas yang komprehensif untuk masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi IKN.
5. Sistem Pemantauan dan Evaluasi yang robust untuk memantau dampak lingkungan dan sosial secara *real-time* dan adaptif.
6. Strategi Integrasi Regional yang memastikan IKN memberikan *spillover effect* (dampak yang tidak langsung atau efek samping dari suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi di satu tempat, yang kemudian mempengaruhi tempat lain yang tidak secara langsung terlibat) positif ke seluruh Kalimantan, bukan hanya menjadi *enclave eksklusif*.

Pembangunan IKN adalah momentum besar untuk mendemonstrasikan bahwa Indonesia mampu membangun kota berkelanjutan kelas dunia. Namun ini membutuhkan komitmen jangka panjang, transparansi, dan partisipasi aktif semua stakeholder, terutama masyarakat lokal sebagai pemilik sah tanah leluhur ini.

Pembaca Setia Swara Pertalindo



Kadis LH Kota Jambi



Walikota Jambi



Kadis LH Samarinda

KOTA SAMARINDA

DENGAN LINGKUNGAN SUNGAI DAN TAMBANG :

Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Pulau Kalimantan membuat Kota-Kota sekitar telah mengambil ancang-ancang menjadi penyanga, khususnya Kota Samarinda di Kalaimantan Timur dan Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Berikut hasil pengamatan Swara PertaLindo di kedua kota tersebut.

Kota Samarinda dengan lingkungan sungai-sungai dan tambang, khususnya tambang batubara membuat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur tersebut unik. Disamping itu, lingkungan sungai dan tambang batubara tersebut perlu diwaspadai karena kondisi air sungai yang keruh menggambarkan ada nya pencemaran. Adanya areal pertambangan di sekitar kota juga

mengkhawatirkan akan menimbulkan dampak debu tambang dan limbah asam tambang yang di perairan.

Namun demikian masyarakat Kota Samarinda tetap bersemangat dan mengantisipasi limpahan pembangunan ekonomi dan social dari IKN tersebut. Khususnya melalui transportasi udara, Kota Samarinda dengan Bandar Udara nya APT. Pranoto akan menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan dari luar dan ke dalam IKN dan sebaliknya. Hal ini dikaitkan dengan status Bandar Udara yang dibangun di IKN itu sendiri berstatus Bandar Udara Khusus yang hanya bisa akses untuk kalangan tertentu.



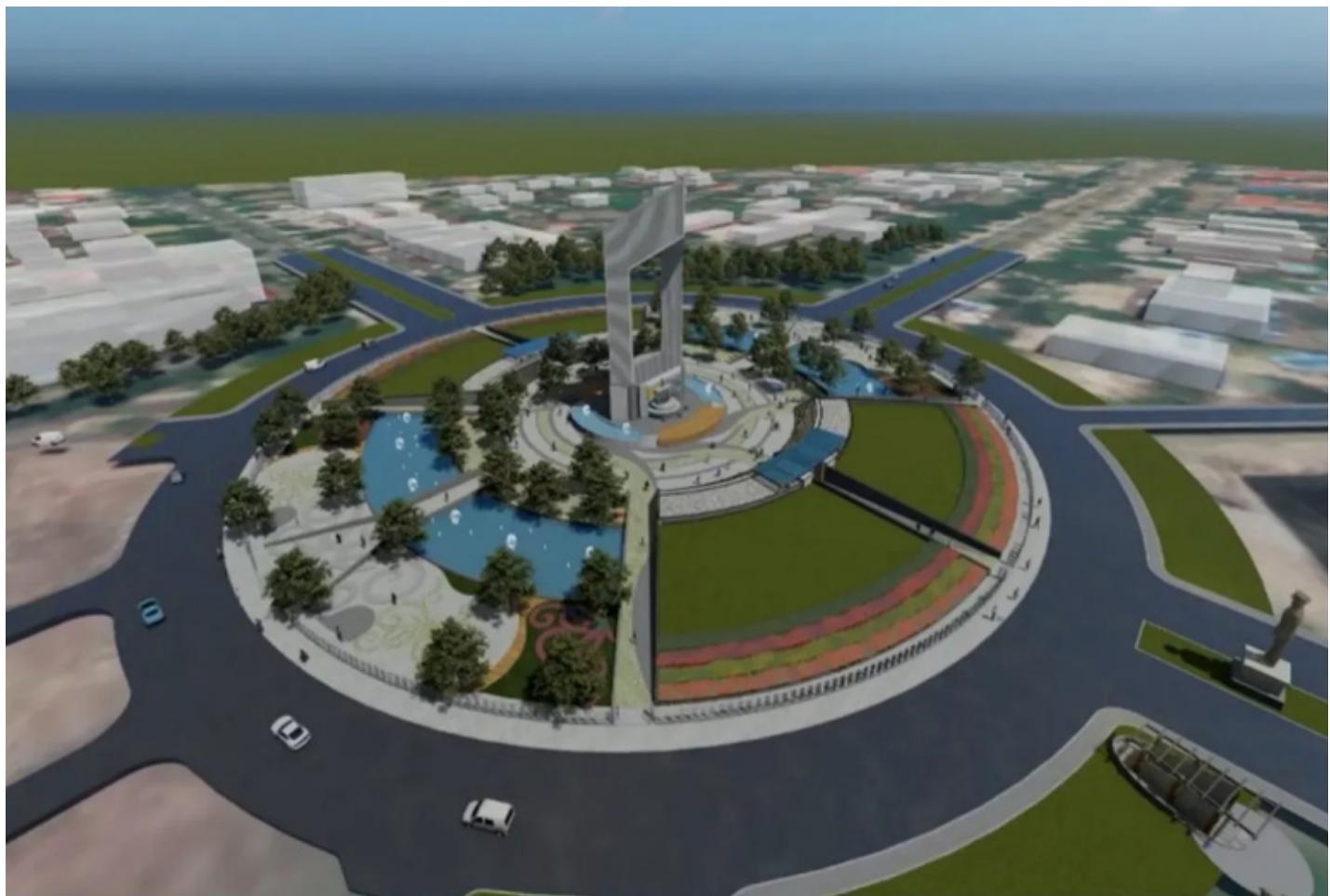
Disamping itu, Kota Samarinda juga akan menjadi gerbang utama jalur transportasi darat. Dalam hal ini hubungan darat antara Kota Samarinda dengan Kota Balikpapan di Bagian Selatan sudah dibangun jalan tol. Sementara itu, jalur laut yang masuk melalui Kota Balik Papan akan memilih jalur jalan tol Balik Papan IKN via Kota Samarinda. Jalur laut pada umum nya akan dimanfaatkan untuk pengangkutan barang-barang dan alat-alat berat yang tidak memungkinkan diangkut melalui jalur udara.

Demikian kesiapan Kota Samarinda dan Kalimantan Timur dalam menyambut berkembangnya IKN di lingkungan kedua Wilayah Administrasi tersebut.



KOTA PALANGKARAYA

Dengan bundaran besar bersiap menyangga IKN



Kota Palangkaraya, Ibu Kota Kalimantan Tengah dengan posisi arah ke Barat dari IKN juga telah bersiap menjadi penyangga perkembangan IKN. Hal ini dibuktikan dengan dimulainya pembangunan jalan darat dari Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Timur khususnya IKN (Berita Sampit 22 Mei 2025). Dengan demikian, jika pembangunan IKN selesai dilaksanakan Palangkaraya juga akan menjadi salah satu Gerbang untuk ke IKN.

Posisi Kota Palangkaraya yang berada di tengah Pulau Kalimantan tetapi memiliki akses yang baik untuk jalur udara. Bandar Udara Tjilik Riwut yang cukup ramai dengan pengunjungnya.

Kota Pangkaraya konon kabarnya pernah direncanakan untuk menjadi Ibu Kota Negara di Zaman Presiden Soekarno. Kemudian di Zaman Presiden Joko Widodo pada awalnya juga direncanakan di Kota ini tapi kemudian dengan alasan tertentu berpindah ke Lokasi Kalimantan Timur.

Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.853,12 km² dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2024 sebanyak 315.153 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 110 jiwa/km². Jarak Kota Palangkaraya dari IKN lebih kurang 617,6 Km² dengan jarak tempuh dengan kondisi jalan darat seperti sekarang akan ditempuh selama 13 Jam 13 menit. Konon kabarnya, saat ini Pemerintah Kota Kalimantan Tengah sedang merencanakan jalan tol yang menghubungkan kedua lokasi tersebut. Kalau saja rencana tersebut dapat direalisasikan maka IKN dari Kota Palangkaraya dapat ditempuh dalam waktu 6 Jam saja.

Kota Palangkaraya yang termasuk kota terluas di Indonesia ini memiliki topografi yang datar dengan kondisi jalan-jalan utama yang cukup lebar dan lalu lintas kendaraan yang tertib. Kota ini dihuni oleh sebagian besar suku asli yaitu suku Dayak yang masih memegang adat istiadatnya dengan kuat membuat Kota ini sangat nyaman untuk kendaraan bermotor.

WORKSHOP

Pemeliharaan Kompetensi Penyusun Amdal



Pada Hari Sabtu, 7 Desember 2024 Pertalindo melaksanakan kegiatan WORKSHOP PKPA (Pemeliharaan Kompetensi Penyusun Amdal) di Hotel Golden Butique Kemayoran Jakarta. Kegiatan ini wajib diikuti oleh Pemegang Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal satu kali dalam satu tahun. Pertalindo telah memprogramkan pelaksanaannya sebanyak 4 kali dalam satu tahun, yaitu pada kwartal satu (awal tahun), Kuartal dua (pertengahan tahun), Kuartal ke tiga (pertengahan tahun), dan pada kuartal empat (akhir tahun) sehingga setiap pemegang Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal bisa menyesuaikan dengan waktu yang sesuai dengan jadwal pekerjaan dan kegiatan lainnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Pertalindo Ir.Ilan R.Suriadi menyampaikan sambutan dan mengucapkan selamat datang pada para peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua umum Pertalindo secara resmi membuka PKPA ke 2 tahun 2024. Hadir pada kesempatan itu sebanyak 42 orang peserta Worshop PKPA, diantaranya terdapat sebanyak 5 orang bergelar Guru Besar.

Workshop PKPA dilaksanakan selama dua hari dengan materi dan narasumber sebagai berikut:

1. Dit.Pencegahan Dampak Lingkugnan Usaha dan Kegiatan Keberadaan LUK dan TUK serta system informasi Lingkungan Hidup

(AMDALNET) dalam rangka percepatan pelayanan proses Amdal

2. Dit.Penganduan, Pengawasan, dan Saksi Administrasi. Ditjen Penegakan Hukum Penaatan terhadap sanksi administrasi paksaan Pemerintah dan Penerapan Denda berdasarkan Permen LHK No.14 tahun 2024
3. Dr.Drs.Dwi P.Sasongko, M.Si (Akademisi Anggota Dewan Penilai TUK KL/BPLH) Etika Profesi Penyusun Amdal: Tantangan pada Implementasi PPNO.22 tahun 2021
4. Dr. Amirudin Tahir, M.Si (Praktisi, Penguji, Penyusun Amdal) Aspek kritis dalam pelingkungkupan dan metodologi Amdal: Untuk mendapatkan Prokiraan Dampak Penting ynang Baik
5. Betara Hendro Cahyono, S.Sos, M.Si (Praktoso Penyusun Amdal) Aspek penting terkini dalam pelibatan masyarakat dan penentuan responden pada dampak social ekonomi dan social budaya
6. Ganiawati, SKM (Praktisi Penyusun Amdal) Implementasi pedoman kajian aspek kesehatan masyarakat dalam Amdal (Kementerian Kesehatan 2024) pada prakiraan dampak
7. Ir. Ilan R.Suriadi (Praktisi Penguji Penyusun Amdal) Merode Evaluasi dampak secara holistic dalam Amdal
8. Al Muzni, S.Pi, M.Si (Praktisi Penyusun Amdal) Aspek kritis dalam penyusunan dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

KABAR DARI DPP KALTIM

DPP Kaltim Ngobrol Bareng bersama Kadis LH Kota Samarinda



Pada tahun Bulan November 2023 Jumlah anggota Pentalindo di Kaltim adalah sebanyak 46 Orang yang diketua oleh Haryanto Samie. Berbagai kegiatan pembangunan sedang dilaksanakan di Kaltim antara lain kegiatan pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, pembangunan bidang kehutanan, pembangunan kota dan lainnya tentu membutuhkan tenaga ahli lingkungan khususnya untuk Analisa mengenai dampak lingkungan nya baik Amdal, UKL/UPL maupun kegiatan pengelolaan dan pemantauan.

Berbagai kegiatan sudah dilakukan oleh teman-teman dari DPP Pentalindo Kaltim diantanya pernah melakukan penanaman mangrove di wilayah pantai, sebagai penggerak gerakan memungut sehelai sampah (GMSS) bersama penerima Kalpataru tahun 2023 Pak Misman.

Saat ini DPP Pentalindo Kaltim sedang menjajaki kerjasama dengan Pemkot Samarinda untuk berbagai kegiatan. Namun Pak Haryanto belum bersedia belum bersedia menyebutkan dibidang

apa saja. Menurut DPP Pentalindo Kaltim dalam waktu dekat akan menghadap Wawako Samarinda untuk bersilaturrahmi.

Kota Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur Umumnya adalah wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya mineral dan sumberdaya hutan. Sehari-hari kelihatan adanya aktivitas pengangkutan, pembongkaran, dan pemuatan hasil-hasil sumberdaya alam tersebut, baik yang akan dibawa keluar daerah maupun yang digunakan untuk pembangunan fisik di Kota Samarinda sendiri.

Keindahan kekayaan alam tersebut seakan-akan ternoda oleh pemandangan air sungai yang keruh dan pemandangan yang gersang dari lokasi muat dan bongkar barang bangunan.

Pentalindo DPP Kaltim diketuai oleh

resmi berdiri pada tahun Dengan Ketua DPP Pertama nya adalah Ir. Sulaeman, MP



Haryanto Samie dan penulis di Kantor DLH Provinsi Kaltim



Diajak nyantai oleh Ketua DPP Pentalindo Kaltim

LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Pengalaman Seorang Kadis Mengelola Lingkungan Hidup

Ir. Endang Liansyah, MP



Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur perkembangannya cukup pesat, apalagi setelah dimulai pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota Samarinda dan Kota Balik Papan adalah Kota yang menjadi gerbang IKN.

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2020 adalah sebesar 834.824 jiwa dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 868.500 atau naik sebesar sebesar 4% selama 5 tahun atau sebesar kurang dari 1% per tahun. Penduduk Kalimantan Timur berjumlah sebanyak 4.045.860 dan sebanyak 21% diantaranya ada di Kota Samarinda.

Sama dengan kota-kota lain di Indonesia, sampah merupakan masalah besar dan sulit dipecahkan. Demikian juga yang dirasakan oleh Ir. Endang Liansyah, MP, Kadis Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Menurutnya masalah sampah itu terjadi berkaitan dengan perilaku penduduk dan kurang dana untuk pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Perilaku penduduk yang tidak peduli sampah membuat jumlah sampah menjadi banyak dan berserakan. Sementara itu, Jumlah sampah yang membludak tidak terolah di

TPA. Kapasitas pengolahan sampah di TPA perlu ditingkatkan tapai dana untuk pembangunan TPA yang lebih besar tidak mencukupi.



Penulis, Ketua Pertalindo Kaltim (Heryanto Samie),
dan Kadis LH Kota Samarinda



Foto: Aksi Bakti Lingkungan Alumni IPB

Bakti Lingkungan Hidup Partisipasi Alumni IPB Untuk Lingkungan Hidup di Kota Samarinda

Lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat dalam bentuk organisasi Alumni pun punya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan oleh Himpunan Alumni IPB di Kalimantan Timur. Mereka melakukan bakti lingkungan dengan penanaman bibit-bibit tanaman di lahan-lahan kritis dan memerlukan tumbuhan untuk kelestarian lingkungannya.

Menurut Cucu Sumpenak salah seorang dari Alumni IPB (Institut Pertanian Bogor) di Samarinda, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Himpunan Alumni IPB di Kaltim memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua Dewan Pembina: Riza Indra, Ketua Dewan Pengawas: Kurnia, Ketua: Sulaeman, Wakil Ketua: Sanjaya dan Ikhsan Supratman, Sekretaris: Khaerani Hasibuan, Bendahara: Imam Irwanto. Cucu Sumpenak memperkirakan Alumni IPB di Kaltim ada sebanyak 400 orang dan berdomisili di Samarinda sebanyak 150 orang.

Menurut Cucu yang dihubungi melalui telpon,

kegiatan Himpunan Alumni IPB di Kaltim khususnya di Kota Samarinda adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat social. Kegiatan tersebut mereka sebut dengan Bakti Lingkungan yang antara lain, Penanaman Mangrove di Paser, Susur Sungai Mahakam, Kepedulian terhadap anak yatim dan Panti Asuhan.

Berkaitan dengan Bakti Lingkungan di Kota Samarinda, Alumni IPB bekerjasama dengan penggerak lingkungan setempat yaitu Misman, seorang penerima Kalpataru tahun 2023 kategori penyelamat lingkungan. Mereka juga bekerjasama dengan Ir.Akhyari seorang pemerhati ekosistem sungai di Kota Samarinda yang juga seorang anggota Pertalindo Kaltim.

Untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan menurut Cucu, Himpunan Alumni ini menerima dana dari para donator dan sumbangan Alumni IPB yang di Kaltim. Di masa mendatang menurut Cucu Organisasi ini mengharapkan dukungan dari berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungan dan kegiatan social masyarakat.

KOTA SAMARINDA

EKOSISTEM SUNGAI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ir. Kifyatul Akhyari, Penggerak Pelestarian Ekosistem Sungai Kota Samarinda



Foto: Ir. Kifyatul Akhyari dan penulis dengan latar belakang Sungai yang menjadi pusat perhatiannya untuk pelestarian ekosistem sungai.

Sebenarnya ada beberapa ekosistem di Sungai Karang Mumus, tapi saya akan jelaskan yang paling menarik perhatian orang banyak saat ini, yaitu ekosistem, sebut saja ekosistem biawak, ular, dan buaya.

Secara alami pinggiran Sungai Karang Mumus adalah habitat dari ketiga hewan melata tersebut. Mereka hidup saling mengontrol satu sama lain, dimana biawak suka makan telor buaya dan telor ular. Dengan demikian populasi buaya terkontrol oleh biawak. Begitu juga populasi ular juga terkontrol oleh biawak. Kadang-kadang biawak itu sendiri juga dimakan oleh buaya dan ular.

Kemudian ada kebijakan dari Pemerintah Setempat untuk membangun turap beton di pinggiran sungai, katanya supaya tidak erosi dan terlihat rapi. Setelah turap beton dibangun apa yang terjadi? Jumlah biawak berkurang sehingga predator pemakan telor buaya dan telor ular juga berkurang. Akibatnya populasi buaya bertambah dan populasi ular pun bertambah. Seterusnya kedua hewan ini bisa mengganggu kehidupan manusia.

Populasi biawak berkurang karena pinggiran Sungai Karang Mumus itu adalah habitat atau hidup bagi biawak, ular, dan buaya. Jadi pinggiran sungai yang berawa dan ber air serta tidak di beton itu adalah habitatnya biawak dan ketika pinggiran sungai Karang Mumus di beton kehidupan ketiga hewan tersebut tidak lagi berlangsung seperti biasa.

Sebenarnya, bukan kah sudah ada aturan pemanfaatan pinggiran sungai yaitu sepadan sungai?

Sepadan sungai hanya mengatur untuk tidak membangun wilayah pinggiran sungai. Memasang turap beton tidak diartikan sebagai membangun. Untuk itu kami mengusulkan zona riparian. Zona riparian adalah wilayah yang berada di sepanjang tepi sungai, danau, atau badan air lainnya. Zona ini merupakan zona penyangga antara ekosistem perairan dan daratan. Jadi dalam zona riparian ini tidak mungkin dibangun turap beton.

Berapa Panjang Sungai Karang Mumus dan berapa panjangnya yang anda usulkan agar dipertahankan sebagai "zona riparian"?

Sungai Karang Mumus itu panjangnya lebih kurang 34,700 Km dan hanya yang bisa kami pertahankan sebagai zona riparian adalah sepanjang 1,7 Km. Beberapa nama sungai di Kota Samarinda antara lain: Sungai Karang Mumus (34.700 Meter), Sungai Karang Asam Besar (18.800 Meter), Sungai Sambutan (15.000 Meter), Sungai Langsat/Karang Asam Kecil (5.500 Meter), Sungai Pampang Kanan (4.800 meter), Sungai Pampang Kiri (2.800 meter), dan Sungai Palaran.

Sungai-sungai lain di Kalimantan Timur, antara lain: Sungai Berau, Sungai Kelai, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belyan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa.

MISMAN

"Manusia Sungai" dari Samarinda, Penerima Kalpataru 2023



Foto: Misman dan Penulis di Sebuah Taman di Pinggiran Sungai Karang Mumus

Di pinggiran Kota Samarinda terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Karang Mumus. Sungai tersebut melewati Kota Samarinda sebelum bermuara ke laut yang tidak begitu jauh dan masih dalam batas Kota Samarinda.

Beberapa tahun yang lalu sungai ini menjadi perdebatan antara pihak Pemerintah Kota dengan pemerhati lingkungan hidup. Pemerintah Kota Samarinda berencana membangun pinggiran sungai Karang Mumus tersebut dengan beton. Maksudnya untuk mempertahankan lebar sungai dan memperindah wajah sungai di Kota Samarinda.

Namun, pemerhati lingkungan berpikir lain bahwa Sungai Karang Mumus adalah habitat bagi berbagai kehidupan sungai antara biawak, ular, ikan, dan hewan sungai lainnya. Pinggiran sungai Karang Mumus adalah media untuk bertelur bagi binatang-binatang air khususnya biawak. Kalau pinggiran sungai di beton biawak akan kesulitan untuk bertelur sehingga populasi biawak akan berkurang drastic. Pada hal biawak adalah pemakan telur buaya. Kalau biawak berkurang maka tidak ada yang memakan telur buaya. Buaya akan berkembang biak dengan cepat dan akan memusuhi manusia. Demikian dijelaskan Ir. Akhyari seorang pemerhati lingkungan hidup dan

sehari-hari beliau adalah temannya Misman dalam melestarikan sungai, khususnya Sungai Karang Mumus.

Kenapa Peduli Sungai ?

Sampah sungai dimana-mana mengkhawatirkan, masih banyak masyarakat yang menganggap sungai adalah tempat pembuangan segala sesuatu yang tidak berguna. Hal ini menyebabkan sungai menjadi rusak. Terjadi pendangkalan, airnya tidak mengalir, menjadi tumpukan berbagai macam sampah, menjadi sumber penyakit, menghilangkan mata pencarian penduduk, rusaknya ekosistem sungai, dan munculnya masalah baru akibat kelangkaan salah satu mata system yang terkait dengan sungai.

Hal ini rupanya menjadi perhatian khusus bagi seorang mantan reporter sebuah Harian di Kota Samarinda, Misman. Hampir setiap hari Misman ada di sebuah Taman kecil di pinggir Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Beliau mengajak setiap orang yang datang ke Taman tersebut untuk memungut sehelai sampah dan menempatkannya ke tong sampah.

Menurut Misman, kegiatan tersebut mengandung makna edukasi (Pendidikan),

mencegah pembuangan sampah, dan sekaligus membersihkan lingkungan sungai dari sampah-sampah oleh masyarakat yang semula bermaksud untuk santai dan rekreasi.

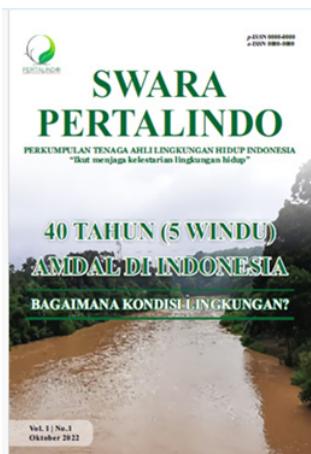
Ketika ditanyakan, "kenapa harus peduli sungai?" Misman menjawab: "sungai sering dianggap sebagai tempat membuang sampah oleh masyarakat sehingga sungai menanggung beban sampah. Pada hal sungai mengemban tugas yang lebih mulia, yaitu mengalirkan air, media transportasi, habitat berbagai macam kehidupan, dan bahkan sumber air bagi masyarakat tertentu. Untuk itu, sungai harus diselamatkan supaya tidak terjadi kerusakan ekosistem".



Sungai Karang Mumus dilalui oleh berbagai jenis kapal

SWARA PERTALINDO

"HADIR UNTUK MEDIA LINGKUNGAN"



SWP Vol 1 No.1 2022



SWP Vol 2 No.1 2023



SWP Vol 2 No.2 2023



SWP Vol 3 No.1 2024



SWP Vol 3 No.2 2024



SWP Vol 4 No.1 2025

Redaksi menerima tulisan, foto, gambar/lukisan sendiri yang berkaitan dengan kegiatan DPP dan DPN serta berita lingkungan hidup dari daerah maupun pusat. Pengirim hendaklah menyertakan foto copy KTP. Karya tersebut akan dimuat di Swara Pertalindo terbitan berikutnya.

Redaksi juga menyediakan ruang iklan untuk UMK dan UMKM, Perusahaan Konsultan Amdal, Promo Buku-Buku, dan Promo Personal untuk keahlian tertentu dengan pengenaan sedikit biaya.

Pembaca Setia Swara Pertalindo



Ketum Pertalindo



Ekspos Swara Pertalindo



Ketua DPP Banten



Direktur PT. Arthayu



Pengurus DPN



Direktur PT. AAN



Kadis LH M.Jambi



Kadis LH Batanghari



DLH Batanghari Jambi

